

# SEBAGAI FONDASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

i Ni Bertekat Menjadi Benteng Terakhir Pancasila Sebagai Dasar Negara

Wawancara Khunus, Kecala Staf Apokatan Laut Lakeamana TNI fin Marcetia, M.M.

Nasionalisme Masa Kini Dalam Perspektif Pancasila Pancasila Sebagai Paradigma PembangunanKarakter Bangsa

Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Era Reformasi

Dukungan Kebijakan untuk Meningkatkan Peran Televisi Swastadalam Penguatan Ideologi Pancasila

oleh Darmanto



nttp://www.infopublik.org

# T I M

Pengarah

Tifatul Sembiring (Menteri Kominfo)
Basuki Yusuf Iskandar (Sekretaris Jenderal)
Ahmad Mabruri Mei Akbari (Staf Khusus Menteri Kominfo)

Penanggung jawab Freddy H Tulung,

(Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik)

Pemimpin Umum Suprawoto

(Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya)

Pemimpin Redaksi **Sadjan** (Direktur Pengelolaan Media Publik)

Anggota Dewan Redaksi

Ismail Cawidu (Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik)

Dedet Suryanandika (Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi)

Tulus Subardjono (Direktur Komunikasi Publik)

Selamatta Sembiring (Direktur Layanan Informasi Internasional)

Hendra Purnama (Direktur Kemitraan Komunikasi)

Redaktur Pelaksana **Mardianto Soemaryo** 

Penyunting/Editor
Hypolitus Layanan
Dikdik Sadaka
M. Taufik Hidayat

M. Azhar Iskandar Zainal

Tim Tenaga Ahli Sugeng Bayu Wahyono Lambang Trijono Murti Kusuma Wirasti

Design Grafis

Danang Firmansyah

Sekretaris Redaksi M. Taofik Rauf

> Sekretariat Elpira Inda Sari N.K Djatmadi Sarnubi Inu Sudiati Lamini Nixon Elyezer S



# DAFTAR

### ISI

	Salam Redaksi	
	Wawancara Khusus - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, M.M.	V
	TNI Bertekat Menjadi Benteng Terakhir Pancasila sebagai Dasar Nega	ra <b>vii</b>
т	Nasionalisme Masa Kini	
T	Dalam Perspektif Pancasila	1
	oleh <b>Yudi Latif</b>	
TT	Pancasila Sebagai Paradigma	17
11	Pembangunan Karakter Bangsa	17
	oleh Suranto Aw	
ΙIJ	Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Era Reformasi oleh <b>Arief Rachman</b>	25
IV	Dukungan Kebijakan untuk Meningkatkan Peran Televisi Swasta dalam Penguatan Ideologi Pancasila	33
	oleh <b>Darmanto</b>	
	Laporan Studi Lapangan	42
		-

**EDISI 10** JUNI 2013

# PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

#### ABSTRAK

embangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi program untuk mencapai tujuan bangsa. Agar pembangunan dapat fokus pada pencapaian tujuan, maka perlu dipandu dengan visi dan pandangan hidup yang kuat sehingga tidak terombang-ambing dalam pusaran pengaruh kepentingan internasional. Visi dan pandangan hidup itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan kulminasi ciri khas, identitas, jati diri, dan karakter bangsa yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu Pancasila perlu dimantapkan kedudukan dan fungsinya yang utama, yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Giliran berikutnya nilai-nilai Pancasila harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi acuan proses pembangunan karakter bangsa, yaitu karakter mulia berbasis nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila menjadi paradigma atau cara pandang yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku, acuan berinteraksi dengan orang lain, acuan menilai suatu tindakan baik atau buruk, sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif, dan sebagai dasar bagi penertiban kehidupan sosial.

#### Oleh Suranto Aw\*

Dr. Suranto Aw, M.Si, Dosen mata kuliah Pancasila pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, aktif menulis artikel di berbagai media massa.

suranto@uny.ac.id

Kata kunci : Pancasila, paradigm, karakter bangsa.

#### Pendahuluan

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang tantangan berat yang menghadapi dari berbagai merupakan konvergensi dampak globalisasi. Situasi global dunia perkembangan oleh didukung teknologi komunikasi berbasis komputer secara masif telah menciptakan gejala umum bahwa masyarakat sangat mudah mendapatkan terpaan informasi dari media. Informasi tersebut tidak semuanya relevan pembangunan karakter upaya bangsa. Giliran berikutnya pola perilaku masyarakat mengalami banyak perubahan. Nilai-nilai religius, sosial, dan budaya yang bersumber dari budaya lokal dan adat istiadat yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh masyarakat, ada kecenderungan mulai dilupakan. Kondisi faktual menunjukkan masyarakat pemahaman kurangnya terutama di kalangan generasi muda tentang etika, solidaritas, nasionalisme, dan patriotisme. Sering dilupakannya nilai-nilai kejujuran, seringnya terjadi pelanggaran disiplin, kurang menghargai perbedaan, rendahnya semangat pengembangan diri, dan menurunnya integritas antara kata dan tindakan.

dampak sebagai masalah Berbagai globalisasi hanya dapat diatasi dengan solusi yang berbasis peningkatan kualitas manusia, ialah manusia yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan sekaligus memiliki karakter teknologi, mulia. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 ditegaskan bahwa: "Pendidikan mengembangkan berfungsi nasional kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dengan demikian sangat jelas

bahwa undang-undang ini mengamanatkan dan menegaskan arti penting pendidikan sebagai agen peningkatan kualitas anak bangsa, dalam aspek penguasaan pengetahuan (intelektual) maupun aspek nilai etika dan budaya (karakter). Dalam hal ini "pendidikan nasional" dapat dipahami sebagai pendidikan dalam arti luas, yaitu proses pendidikan yang terjadi di sekolah maupun di masyarakat.

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, dan di setiap jalur, termasuk pendidikan non formal yang terjadi di masyarakat semestinya diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Dapat dimaknai bahwa amanah undang-undang adalah agar penyelenggaraan pendidikan mampu membekali bangsa ini dengan dua hal: pengetahuan dan nilai-nilai. Dengan dua tersebut, diharapkan dapat ienis bekal dilakukan peningkatan kecerdasan sekaligus pembentukan karakter sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan cakap berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kesuksesan dan kemajuan bangsa tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter sangat Karakter ditingkatkan. penting untuk merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma Pancasila, agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Permasalahannya adalah bahwa apabila

masyarakat hanya terfokus memperoleh terpaan pengajaran iptek melupakan pendidikan karakter akan menghasilkan profil masyarakat yang kuat di iptek namun lemah di karakter. Unggul di cipta dan karya tetapi keropos di rasa dan karsa. Akibatnya cipta dan karya tidak dipandu oleh rasa dan karsa. Iptek tidak dipandu karakter mulia. Akliyah tidak dipandu nakliyah dan amaliah. Hal ini berbahaya, ketika iptek itu diimplementasikan dalam dunia kerja, maka iptek itu akan tidak dikendalikan atau dikawal oleh nilai-nilai karakter, moral, budaya, dan kearifan sehingga serakah, merusak, merugikan bangsa. Dengan demikian kelemahan kualitas sumberdaya manusia justru disebabkan oleh rendahnya penguasaan aspek karakter, budaya, etika, dan moral.

Berdasarkan uraian di atas, premis tulisan ini menekankan pada pandangan bahwa karakter bangsa akan tumbuh, berkembang, dan melembaga apabila digarap oleh para pemangku kepentingan secara sistematis dan berkekelanjutan. Oleh karena itu, dimensi-dimensi pendidikan karakter harus didesain, dikembangkan, dilembagakan, dan diintegrasikan ke dalam berbagai pesan pendidikan baik dalam kurikulum sekolah maupun rubrik acara di media massa. Penerapan pendidikan karakter dirancang, disesuaikan dengan karakteristik nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh Bangsa Indonesia, yaitu harus menempatkan Pancasila sebagai paradigmanya. Mengacu pada premis ini, maka dipandang strategis untuk melakukan kajian Pancasila sebagai paradigma pembangunan karakter bangsa.

#### Pengertian Paradigma

Paradigma ialah sumber acuan yang menjadi bahan pertimbangan bagi proses berpikir dan bertindak. Dengan demikian ketika suatu nilai ditempatkan sebagai suatu paradigma, maka nilai-itu akan mengejawantah dalam cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Agus Salim (2006: 96) mengatakan "paradigma adalah

basis kepercayaan utama atau metafisika dari sistem berpikir: basis dari ontologi, epistemologi, dan metogologi". Lebih lanjut Agus Salim (2006: 96-97) menguraikan bahwa dalam pandangan filsafat paradigma memuat pandangan-pandangan awal yang membedakan, memperjerlas, dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Dengandemikiandigunakannyanilaisebagai paradigma akan membawa konsekuensi bagi perilaku, cara berpikir, interpretasi, dan kebijakan dalam penyelesaian masalah.

Thomas S. Khun (1970) sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2003: 226) menjelaskan pengertian paradigma sebagai asumsi dasar dan asumsi teoritis yang merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, cirri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pendapat senada dikemukakan oleh Kaelan (2003: 226-227) bahwa istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber azas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa paradigma adalah sumber nilai, sumber acuan, dan kerangka berpikir. Peran paradigma dalam proses berpikir dan bertindak adalah merupakan suatu dialog intensif guna menghasilkan suatu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### Konsep Pembangunan Karakter

Menurut Deal Savage & Armstrong (1996: 104), "caracter is defined as the constellation of values, beliefs and institutions unique to given group of people". Hal ini berarti, bahwa karakter adalah rangkaian nilai, kepercayaan, dan adat yang unik yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas karakter adalah "bawaan,

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak". sedangkan berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak".

Schein, E.H. (1985: 12), menjelaskan karakter sebagai suatu pola asumsi dasar hidup yang diyakini bersama: yang diciptakan, diketemukan, dibangun dan dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dan dapat digunakan mengatasi persoalan hidup mereka, oleh karenanya diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai pegangan perilaku, berpikir, dan rasa kebersamaan di antara mereka. Sementara itu dalam UU Sisdiknas, Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya nilai-nilai karakter mulia yang relevan dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Suyanto (Suharjana, 2011: 29) terdapat Sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, tolong menolong, kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; (9) toleransi, kedamaian, kesatuan.

Era reformasi memberi makna bagi proses pembanguan di segala bidang di Indonesia, ialah agar pembangunan bangsa ditata kembali dan dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya di masyarakat dengan berlandaskan pada ideologi dan dasar negara . Orientasi pembangunan karakter harus senantiasa terkait dengan visi pembangunan suatu bangsa (kebijakan pemerintah). Hal ini disebabkan, secara teoritis terdapat pola hubungan timbal balik antara variabel pembangunan dan karakter bangsa. Pembangunan yang sukses memerlukan dukungan karakter mulia, sebaliknya pendidikan karakter akan sukses

apabila proses pembangunan nasional juga berproses secara memadai.

Pembangunan yang berpusat pada manusia secara konseptual adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk manusia. Tujuan pembangunan bukan saja untuk terbebasnya manusia dari kebodohan dan kemiskinan, tetapi untuk pengembangan kualitas manusia secara utuh dan komplit. Iptek dan moral. Intelektual dan cultural. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya berorientasi pada perubahan kuantitatif yaitu produk-produk material yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia, melainkan yang lebih penting adalah muaranya ke arah perubahan kualitatif (being) sehingga setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensi dirinya secara komplit lahiriah-batiniah, pengetahuanketerampilan-moral, fisik-karakter mental.

Pembangunan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (3) UUD 1945, menugaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pada pasal 32 menegaskan suatu komitmen bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Makna pembangunan karakter adalah sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menilai baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari (Kemendiknas, 2010). Karakter yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki masyarakat agar mampu menghadapi tantangan hidup pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Proses pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas karakter dirancang melalui program yang sistematis. Program

**EDISI 10** JUNI 2013

tersebut dibangun secara partisipatif oleh seluruh warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan, yaitu pihak pemerintah, para pemuka pendapat, media massa, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk berkomitmen menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang demokratis, yang membentuk budaya kerjasama; menumbuhkan budaya profesionalisme; menciptakan iklim yang kondusif, menumbuhkembangkan keragaman budaya.

Pembangunan karakter kurang lebih sama dengan pengembangan budaya organisasi lainya. Harapan pengembangan budaya organisasi adalah menciptakan budaya unggul. Mencipkan budaya unggul menurut pendapat Cocld & Piramid (2007: 58, 59), paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mempunyai visi untuk unggul, untuk mewujudkan budaya unggul, visi akbar yang menggetarkan harus digerakkan;
- Memiliki kepimpinan yang kompeten, profesional, dan inspiratif, harus memberi contoh kepada karyawan; dan
- Memperbaiki lingkungan organisasi, paradigma para pemimpin harus berubah sesuai dengan kondisi yang berubah.

Pembangunan karakter di masyarakat tidak mudah, karena perlu menyesuikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Untuk itu Fith (1958: 155), mengatakan "Is any even, social or Cultur change cannot be regarded as a mechanical process, not successfull adjustmen as a simple matter of introducing development enlightenment, and process, to backward races"

Untuk strategi pengembangan karakter di sekolah menurut pendapat Zamroni (2002: 31, 39) dapat dilakukan melalui tiga tataran yaitu :

a. Pengembangan pada tataran spirit dan nilai-nilai yang meliputi spirit dan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keterbukaan, kejujuran, semangat hidup belajar, menyadari diri sendiri dan keberadaan orang lain, persatuan dan kesatuan, untuk selalu bersikap dan prasangka positif, disiplin diri, tanggung jawab dan kebersamaan.

- b. Pengembangan pada tataran teknis, yaitu:
  - 1) Struktur organisasi sekolah,
- 2) Diskripsi tugas sekolah,
  - 3) Tata tertib guru,
  - 4) Tata tertb siswa,
  - 5) Standar sistem pembelajaran yang harus diikuti guru dan siswa,
  - Hubungan formal dan informal antar kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan atau sesama guru dan tenaga kependidikan termasuk hubungan dengan siswa,
  - Berbagai sangsi bagi siswa yang tidak jujur dan tidak disiplin,
  - Berbagai program kerja dalam rangka membina keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
  - 9) Berbagai program kerja sekolah dalam rangka membiasakn siswa melakukan pemecahan masalah,
  - Berbagai program ekstrakurikuler yang dapat menumbuh kembangkan kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat hidup, persatuan dan kesatuan,
  - Berbagai strategi belajar dan pembelajaran yang mendorong siswa agar semangat belajar, dan
  - 12) Berbagai aturan perawatan dan kebersihan fisik sekolah.
- c. Pengembangan pada tataran sosial, pengembangan pada tataran sosial ini merupakan proses implementasi dan institusionalisasi, seluruh kebijakan dan aturan teknis yang dikembangkan berdasarkan spirit dan nilai-nilai sehingga menjadi kebiasaan (work habits) di sekolah dan di luar sekolah.

#### Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Karakter

Pancasila sebagai hasil karya bangsa Indonesia, merupakan kulminasi ciri

khas, identitas, jati diri, dan karakter bangsa yang dapat membedakan dengan bangsa lain, sehingga menjadi tugas seluruh anak bangsa untuk mengkaji dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Pancasila perlu dimantapkan kedudukan dan fungsinya yang utama, yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Giliran berikutnya nilai-nilai Pancasila harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi acuan proses pembangunan karakter bangsa, yaitu karakter mulia berbasis nilai-nilai Pancasila, baik dalam makna nilai dasar maupun nilai instrumental. Sebagai nilai dasar kelima sila Pancasila terkandung dalam cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebagai nilai instrumental, berarti Pancasila merupakan arahan, kebijakan, dan strategi yang menginspirasi aspirasi masyarakat, dan peraturan perundangan.

Dengan demikian kelima sila Pancasila menjadi paradigma atau cara pandang yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku, acuan berinteraksi dengan orang lain, acuan menilai suatu tindakan baik atau buruk, sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif, dan sebagai dasar bagi penertiban kehidupan sosial.

#### 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai paradigma pembangunan karakter bangsa, mengandung makna bahwa karkater mulia yang hendak diwujudkan harus sesuai dengan makna inti sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa Negara Indonesia adalah sebagai pengejawantahan tujuan kodrati manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa perlu mengarah kepada hal-hal mencakup: (a) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa; (b) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing beribadah menurut agamanya; (c) Atheisme

dilarang di Indonesia; (d) Menjamin kehidupan beragama dan toleransi; dan (e) Keharmonisan dan kerukunan antar-umat beragama.

## **2.** Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber pada dasar filofofis dan sosiologis, bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat jasmani dan rohani, kodrat sebagai mkhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karakter bangsa berkemanusiaan yang adil dan beradab, dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut: (a) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, berbudaya, bermoral, dan beragama; (b) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang harus saling menghargai, tolongmenolong, dan bekerjasama; (c) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa; (d) Menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama; dan (e) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat.

#### 3. Sila Persatuan Indonesia

sila Persatuan Indonesia terkandung makna bahwa negara merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya Negara menjamin persatuan, meskipun elemen-elemen tersebut berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai Bangsa Indonesia. Pembangunan karakter bangsa berpersatuan Indonesia, mengarah kepada: (a) Negara melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya; (b) Nasionalisme yang tangguh, ditandai komitmen cinta bangsa dan tanah air; (c) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa; (d) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan; dan (e) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenganggungan.

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai filosofis yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ adalah rakyat perwakilan, bahwa merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Pembangunan karakter bangsa mengacu pada sila ini adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang berkarakter dengan dicirikan: (a) Menghargai adanya kebebasan dan tanggung jawab; (b) Menjunjung tinggi musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab; (c) Menjunjung tinggi nilai demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan dan keadilan; dan (d) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada semua individu.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila kelima ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan sosial (kehidupan bersama). Hakikat keadilan sosial adalah keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, masyarakat, bangsa dan negara, serta dengan Tuhannya. Pembangunan karakter yang bertujuan untuk membentuk bangsa yang berkeadilan sosial, mencakup hal-hal sebagai berikut. (a) Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat; (b) Seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat; (c) Keadilan yang didasarkan atas keseimbnangan hak dan kewajiban; dan (d) Menciptakan ketertiban hidup bersama.

#### Penutup

Kondisi faktual di masyarakat yang menyebabkan pembangunan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila mendesak atau urgen dilaksanakan adalah : kurangnya pemahaman dan pelaksanaan makna inti sila-sila Pancasila, sering dilupakannya nilainilai kejujuran, seringnya terjadi pelanggaran disiplin, kurang menghargai perbedaan,

rendahnya semangat pengembangan diri, dan menurunnya integritas antara kata dan tindakan, menurunnya nasionalisme dan patriotisme. Fakta di masyarakat menunjukkan seringnya terjadi tawuran pelajar, pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran hukum dan sebagainya, semuanya menegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila mendesak dan penting untuk dilaksanakan.

Penerapan Pancasila sebagai paradigm pembangunan karakter memiliki berbagai fungsi penting, meliputi: sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, acuan berinteraksi dengan orang lain, acuan menilai suatu tindakan baik atau buruk, sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif, sebagai dasar bagi pemahaman dan penertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### Daftar Pustaka

Agus Salim. 2006. Teori dan paradigm penelitian social. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Darmiyati Zuchdi (Ed.). 2011. Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik. Yogyakarta: UNY Press.

Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Savage, T. V., & Armstrong, D. G. (1996). Effective teaching in elementary sosial studies. Amerika: Merrill an Imprint of prentie hall

Schein, Edgar, H. (1997). Organizational culture and leadership. Second edition. San Fransisco, LA: Jossey Bass A Willey Co.

Shapien, J.,& King.M. (1985). School culture. Good seeds grow in story cultures. 114.115,120

Suharjana. (2011). Pendidikan Karakter dalam perspektif teori dan praktik. Yogyakarta: UNY Press.

Soedijarto. (1998). Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa. Jakarta : Balai Pustaka

Zamroni, (2005). Mengembangkan kultur sekolah menuju pendidikan yang bermutu. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mengembangkan Kultur Sekolah diYogyakarta pada tanggal 23 Nopember 2005.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.